

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan.

Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi langkah-langkah yang diperlukan, dalam menghasilkan RENJA yang tidak hanya berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran dan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam Pengambilan Kebijakan.

Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Tahun-Tahun berikutnya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Drs. H. FATHURRAHMAN.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196806291993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	26
2.3. Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA	65
3.3. Program dan Kegiatan	79
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Provinsi	81
4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan	81
BAB V PENUTUP	
Rencana Tindak Lanjut	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Setda Provinsi NTB tahun 2023.....	7
Tabel 2.2. Pencapaian Indikator Kinerja RENSTRA 2023 dan Anggaran	26
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	32
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	63
Tabel 3.1 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026.....	67
Tabel 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026.....	71
Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.....	79
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.....	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja sebagai sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273. Hal ini juga dinyatakan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 15 ayat 1. Selanjutnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 angka 30, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai Paragraf 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 ayat 2, Penyusunan Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil RENJA Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam RENJA Perangkat Daerah dengan RENSTRA Perangkat Daerah serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam RENJA Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA Perangkat Daerah.

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh 9 (Sembilan) Biro Lingkup Sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan terjadi perubahan kegiatan atau program karena adanya kebijakan dari pemerintah. Sesuai dengan Pergub Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan melihat hal tersebut, maka diharapkan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap

mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini adalah sebagai penjabaran dari RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas–prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Diantaranya Sebagai Berikut :

1. Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Setda Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2024;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar biro pada Setda Provinsi NTB.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Mencakup :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud
- 1.4 Tujuan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Perangkat Daerah.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas

Pemerintah Kota

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2023

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENJA Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 207.140.386.339 ,-** dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **70.85%** dan capaian realisasi keuangan sebesar **Rp. 146.768.267.347** berdasarkan data yang ditampilkan komponen pendukung dalam capaian anggaran pada tahun 2023, sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	65.443.300	71.151.300	108.72
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	65.443.300	71.151.300	108.72
5.	Belanja Daerah	207.142.386.339	146.768.267.347	70.85
5.1	Belanja Operasional	205.586.789.739	145.622.587.421	70.83
5.2	Belanja Modal	1.553.596.600	1.145.679.926	73.74
	Jumlah Belanja	207.140.386.339	146.768.267.347	70.85

untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan/ hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (Outcome) dan indikator kinerja kegiatan (Output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan Setda Provinsi NTB tahun 2023.

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		Indikator	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP PD	Nilai SAKIP A	BB					
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	668.452.160	559.962.735	83.77	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	14	14	100%	159.783.100	151.265.650	94.66	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun	13	13	100%	105.489.200	84.104.875	79.72	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	13	13	100%	110.289.360	91.875.910	83.30	
	- Koordinasi dan penyusunan DPASKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	12	12	100%	41.991.800	31.388.275	74.74	
	- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	12	12	100%	41.621.700	30.403.025	73.04	
	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan kinerja yang disusun	9	9	100%	104.803.500	74.178.500	70.77	

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	- Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	6	6	100%	104.473.500	88.808.500	85.00	
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	79.247.486.217	53.255.400.076	67.20	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji dan Tunjangan	1.062	1.062	100%	78.606.027.957	52.688.945.916	67.02	
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah ASN pelaksana tugas	66	66	100%	369.871.400	311.863.100	84.31	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	3.000	3.000	100%	118.021.860	118.021.860	100	
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan akuntansi SKPD	10	10	100%	32.607.000	30.347.000	93.06	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan keuangan akhir tahun SKPD	8	8	100%	64.463.200	43.441.200	67.38	
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	63	63	100%	17.384.900	12.499.200	71.89	
	- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12	0	0	2.502.900	0	0	

	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	100%	100%	204.181.210	189.254.194	92.68	
	- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	7	7	100%	24.428.010	23.077.010	94.46	
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan Barang milik SKPD	1	1	100%	89.300.000	87.986.684	98.52	
	- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Laporan BMD SKPD	9	9	100%	48.561.500	40.388.000	83.16	
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	3	3	100%	20.815.000	20.115.000	96.63	
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	100%	100%	100%	91.262.000	77.811.569	85.26	
	- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	120	120	100%	91.262.000	77.811.569	85.26	
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.419.201.386	8.014.571.950	85.08	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen/Peralatan Listrik yang disediakan	24	24	100%	30.794.000	30.794.000	1000	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	51	51	100%	658.743.450	396.029.545	60.11	

	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistic yang disediakan	235	235	100%	368.707.076	357.942.936	97.08	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	93	93	100%	207.457.300	185.887.400	89.60	
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	126	126	100%	144.720.000	107.360.000	74.18	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	23.500	23.500	100%	5.942.666.100	5.268.787.337	88.60	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	838	838	100%	2.019.690.560	1.621.947.792	80.30	
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah surat dan arsip yang dikelola	15.000	15.000	100%	52.424.600	52.417.500	99.98	
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	100%	100%	964.501.300	813.059.931	84.29	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	19	19	100%	788.000.000	650.353.000	82.53	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan/mesin	82	82	100%	1760.501.300	162.706.931	92.18	
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	100%	100%	13.104.844.980	12.508.254.898	95.44	

	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	9.650	9.650	100%	36.795.600	18.597.693	50.54	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	40	40	100%	1.796.880.000	1.549.218.027	86.21	
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	25	100%	700.820.000	626.297.500	89.36	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak untuk Pelayanan Umum	375	375	100%	10.567.978.080	10.308.966.178	97.54	
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD	100%	100%	100%	4.472.564.000	2.605.086.745	58.24	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dikelola	20	20	100%	656.706.000	614.213.238	93.52	
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dikelola	217	217	100%	1.870.743.000	1.646.567.707	85.45	
	- Pemeliharaan mebeluer	Jumlah meubeler yang dipelihara	13	13	100%	0	0	0	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	349	349	100%	352.935.000	344.305.800	97.55	

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2	2	100%	1.500.930.000	1.340.011.490	89.27	
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab	3	3	100%	91.250.000	91.230.000	99.97	
	9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	4.824.154.133	4.361.6060.056	90.41	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang penerima gaji	2	2	100%	1.629.142.301	1.492.047.056	91.58	
	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pakaian dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60	60	100%	263.500.000	231.200.000	87.74	
	- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah medical check up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	-	-	-	-	-	
	- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Penerima Dana Operasional	2	2	100%	2.931.511.832	2.638.359.000	89.99	
	10. Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	5.406.338.045	4.676.485.054	86.50	

	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur	12	12	100%	2.465.677.480	2.088.341.580	84.69	
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Gubernur	12	12	100%	1.108.245.350	1.047.725.908	94.53	
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	12	12	100%	1.832.415.215	1.540.417.566	84.06	
	11. Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Materi dan komunikasi pimpinan (KDH/WKDH) sesuai standar	100%	100%	100%	1.493.892.800	979.394.561	65.55	
	- Penyediaan Materi Pimpinan	Jumlah materi Pimpinan yang tersusun	1000 ex	1000 ex	100%	269.293.600	185.869.181	69.02	
	- Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah sambutan yang tersusun	720	720	100%	241.082.200	153.736.400	63.76	
	- Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Pimpinan yang terdokumentasi	1100	1100	100%	983.517.000	153.736.400	65.05	
	12. Fasilitas Keprotokolan	Persentase Fasilitas Keprotokolan pimpinan (KDH/WKDH) Sesuai Standar	100 %	100 %	100%	5.359.045.000	4.659.746.996	86.95	
	- Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi	1000	1000	100%	785.075.000	517.616.794	65.93	
	- Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi	175	175	100%	792.920.000	616.042.110	77.69	
	- Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah kegiatan Pimpinan yang terlaksana	1000	1000	100%	3.781.050.000	3.526.088.092	93.25	

B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang baik meningkat	80%	78%	97,5%	782.986.300	751.318.200	95.95	
	1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	35 PD	35 PD	100%	283.307.300	280.723.944	99.08	
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Analisis Jabatan yang sesuai ketentuan	35 PD	35 PD	100%				
	- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Perda/Pergub tentang Kedudukan, Struktur Org., Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang difasilitasi	4 Dok	4 Dokumen	100%	119.435.700	118.823.682	99.48	
		Jumlah Dokumen Rancangan Pergub tentang Kedudukan, Struktur Org., Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD/UPTB, Cabang Dinas yang difasilitasi	3 Dok	3 Dokumen	100%				
	- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi/ Persetujuan tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten Kota	11 Dok	11 Dokumen	100%	44.435.800	44.335.400	99.77	
	- Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun	3 Dok	2 Dokumen	66,67%	119.435.800	117.564.862	98.43	
		Jumlah Perangkat daerah yang di fasilitasi	35 PD	35 PD	100%	499.679.000	470.594.256	94,17	

	2. Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	pelaksanaan Reformasi Birokrasi							
		Jumlah perangkat daerah yang dimonitoring dan dievaluasi akuntabilitas kinerja	35 PD	35 PD	100%				
		Jumlah Perangkat Daerah dan Unit kerja yang difasilitasi terkait Budaya Kerja, Ketatalaksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik	35 PD	35 PD	100%				
	- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah yang di bina Pelaksanaan PMPRB Provinsi	11 UK	11 UK	100%	134.183.853	133.779.428	99.69	
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi pelaksanaan PMPRB	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%				
	- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah nilai SAKIP A	10 PD		40%	122.769.847	113.966.640	92.82	
		Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah	46 dok						
	- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kinerja	Jumlah Dokumen evaluasi fasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Budaya Kerja Baik	46 Dok	46 Dokumen	100%	26.353.700	24.235.800	91.96	
	- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen SOP Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	35 Dok		40%	104.435.800	98.323.047	94.14	
	- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelayanan publik pada unit kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota yang memenuhi standar pelayanan	6 Dok		25%	111.935.800	100.289.341	89.59	

		Jumlah dokumen hasil monitoring pelaksanaan pelayanan publik Perangkat Daerah	35 Dok						
		Jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan	5 Inovasi						
C.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100%	100%	100%	885.347.200	705.553.607	79.69	
	1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	100 %	135.745.700	118.726.928	87.46	
	- Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Frekuensi movev pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	10	5	50%	10.000.000	9.474.000	94.73	
		Koordinasi kegiatan ke pemerintah pusat	4	0	0				
		Rakor pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	2						
		Dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	3	3	100%				
		Jumlah rakor pertanahan yang dilakukan	1	0	0				
		Jumlah movev pertanahan	10	10	100%				
	- Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	jumlah rakor pimpinan daerah	2	0	0	50.745.500	35.644.198	70.24	
		jumlah dokumen pemetaan daerah rawan bencana, ketentraman dan ketertiban	1	0	0				
		Jumlah rakor daerah rawan bencana dan trantibum	2	0	0				
		jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM	1	1	100%				

	- Fasilitasi Penataan Wilayah	jumlah segmen batas yang sudah ditegaskan secara pasti	2	2	100%	75.000.000	73.608.730	98.14	
		jumlah wilayah yang ditata	15	15	50%				
		jumlah rupa bumi yang difasilitasi untuk dibakukan	2	0	0				
	2. Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	1	1	100%	516.836.500	359.670.180	69.59	
	- Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan DPRD	30	30	100%	291.4571.000	150.069.860	51.48	
		fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota	7	7	100%				
	- Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah DOB yang difasilitasi	3	0	0	50.340.000	37.737.600	74.96	
		jumlah dokumen fasilitasi pengembangan otonomi dan penataan urusan	1	1	100%				
		Rapat koordinasi pelaksanaan Hari Jadi Provinsi dan koordinasi Kabupaten/Kota	6	0	0				
	- Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2	2	100%	175.025.500	171.862.720	98.19	
		dokumen pengembangan peningkatan kapasda	1	0	0				
		dokumen EPPD Kab/Kota	10	10	100%				
		jumlah Dokumen informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat	1	1	100%				

	3. Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	1	1	100%	232.765.000	227.156.499	97.59	
	- Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan	2	10	500%	175.000.000	172.943.589	98.82	
		jumlah dokumen kerjasama antar pemerintah	10	5	50%				
	- Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta	jumlah dokumen kerjasama dengan Badan Usaha/swasta	5	15	300%	32.000.000	29.317.910	91.61	
	- Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	15	1	6 %	25.765.000	24.895.000	96.62	
D.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitas penyusunan produk hukum daerah provinsi yang terbentuk	100%	100%	100%	1.000.287.800	997.662.855	99.73	
		Persentase produk hukum yang tersosialisasi kepada masyarakat	100%	100%	100%				
		Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	100%	100%	100%				
		Persentase produk hukum daerah kab/kota yang terfasilitasi	100%	100%	100%				
		Persentase produk hukum daerah yang terevaluasi	100%	100%	100%				
		Persentase penanganan masalah hukum litigasi	100%	100%	100%				
		Persentase penanganan masalah hukum non litigasi dan HAM	100%	100%	100%				
	1. Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	Persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah MoU	100%	100%	100%	532.534.900	531.538.955	99.81	

		dan Perjanjian kerjasama							
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah produk hukum pengaturan yang terbentuk	10 Perda 30 Perkada	16 Perda 56 Perkada	100%	105.400.000	104.740.000	99.37	
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah produk hukum penetapan yang terbentuk	700 Keputusan Gubernur	828 Keputusan Gubernur	100%	109.610.200	109.580.200	99.97	
	- Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	25 Naskah Hukum	72 Naskah Hukum	100%	157.520.500	148.303.013	94.15	
		Jumlah Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	40 Produk hukum/10 Perda/30 Perda	103 Produk Hukum	100%				
	- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota	- Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan terevaluasi	50 Perda 100 Perda/ perbup/ perwal	82 Perda 187 Perda/ Perbup/ perwal	100%	160.004.200	159.705.742	99.81	
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Kasus-kasus Hukum yang terfasilitasi	100%			467.752.900	466.123.900	99.66	
	- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Litigasi	4			410.002.900	408.373.900	99.60	
	- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	4			57.750.000	57.750.000	100	
		Jumlah Dokumen Pelaporan rencana aksi HAM (RANHAM)	3						
E.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	100	100	100	73.348.893.918	36.225.207.795	49.38	

	1. Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Fasilitas Pembinaan kesejahteraan masyarakat dari segi Mental Spritual	789	1.507	100%	35.837.703.500	22.951.025.725	64.04	
	- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	785	1.503	100%	33.624.755.240	21.438.179.625	63.75	
	- Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	4	4	100%	2.212.948.260	1.521.846.100	68.36	
	2. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah laporan hasil Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	8	8	100%	37.110.190.918	12.998.947.920	35.02	
	- Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	6	6	100%	24.325.082.900	6.252.717.500	25.70	
	- Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2	2	100%	192.250.000	171.930.000	89.43	
	- Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	1	100%	12.592.858.018	6.574.300.420	52.20	
	3. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3	3	100%	400.499.500	275.234.150	68.72	

	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	100%	106.599.900	73.397.500	68.85	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1	1	100%	184.399.800	142.198.5550	77.11	
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1	1	100%	109.999.800	59.639.100	54.21	
F	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Bahan Kebijakan Perekonomian Daerah	100%	100%	100%	1.992.919.190	1.656.567.950	83.12	
	1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah rumusan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian	4 dokumen	4 dokumen	100%	950.000.000	830.766.200	87.44	

	- Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	200.000.000	189.642.200	94.82	
	- Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Bahan kebijakan ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	750.000.000	641.124.000	85.48	
	2. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rumusan bahan Kebijakan Sumber Daya Alam	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	862.925.600	674.547.500	78.16	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	767.339.800	608.037.700	79.23	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan mineral dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan mineral dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	56.402.900	35.207.900	62.42	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	39.182.900	31.301.900	79.88	
	3. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun.	10 dokumen	14 dokumen	140%	179.993.590	151.254.250	84.03	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen	4 Dokumen	200%	44.429.000	42.492.000	95.64	
	- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik	2 Dokumen	4 Dokumen	200%	27.239.900	22.237.900	81.63	

	Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi							
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	33.214.500	15.937.000	47.98	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	27.325.800	26.645.800	97.51	
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	47.784.390	45.941.050	96.14	
G.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3	Level 3 (8/9)	88,89%	3.026.790.900	2.546.137.647	84.12	
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP	100	100	100%	2.037.020.600	1.780.590.222	87.41	
	- Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa	2	5	25%	14.088.200	4.013.000	28.48	
	- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase lelang sesuai pengajuan OPD	100%	100%	100%	2.008.657.900	1.767.597.222	87.99	
	- Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	laporan pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	5 Kab/Kota	3 Kab/Kota	60%	14.274.500	8.980.000	62.90	

	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan system informasi pengadaan barang/jasa	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	327.066.600	310.524.625	94.94	
	- Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah standar pelayanan sesuai standarisasi LPSE	2 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	298.909.700	291.881.725	97.64	
	- Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aplikasi pengadaan barang/jasa yg dikembangkan	2 aplikasi	1 aplikasi	2 aplikasi	14.072.900	9.488.900	67.42	
	- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah informasi pengadaan barang/jasa	100 Informasi	100 Informasi	100 Informasi	14.084.000	9.154.000	64.99	
	3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ yang memenuhi level kematangan minimal 3	30%	10%	33,33%	662.703.700	455.022.800	68.66	
	- Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SDM Terlatih	100	25	25%	108.475.000	91.609.200	84.45	
	- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah kabupaten/kota terbina	10	4	40%	14.205.300	8.735.200	61.49	
	- Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaku pengadaan terlatih	200	50	25%	540.023.400	354.678.400	65.67	
H.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Presentase Pengendalian Pembangunan	100%	100%	100%	389.135.900	351.752.560	90.39	

	13. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Presentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	100 %	100 %	100 %	210.990.800	203.963.960	96.66	
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBD siap analisis	100 %	100 %	100 %	105.690.600	98.783.560	93.46	
	- Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	persentase data hasil monev Pelaksanaan Kegiatan APBN siap analisis	100 %	100 %	100 %	105.300.200	105.180.400	98.88	
	14. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian pembangunan	100 %	100 %	100 %	178.145.100	147.788.600	82.95	
	- Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis yang direkomendasikan	100 %	100 %	100 %	5.049.900	6.352.155	63.52	
	- Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase data laporan yang digunakan untuk rekomedasi	100 %	100 %	100 %	160.580.300	138.923.800	86.51	
	- Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Presentase hasil analisis yang di berikan rekomendasi Kebijakan Pembangunan	100 %	100 %	100 %	9.614.900	3.814.900	39.67	

2.2 Analisis Kinerja Layanan Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dimana jenis indikator yang dianalisis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. IKK Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/303/OTDA tanggal 24 Januari 2011.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah belum dapat diukur berdasarkan SPM/Standar Nasional, karena Sekretariat Daerah belum mempunyai SPM/ Standar Nasional dalam pemberian Pelayanan. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, dapat dilihat dalam tabel 2.2 pada lampiran dibawah ini

Tabel 2.2. Pencapaian Indikator Kinerja RENSTRA 2023 dan Anggaran

No.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		IndikTOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1.	Meningkatnya kualitas layanan kerumahtanggaan pimpinan	Tingkat kepuasan layanan kerumahtanggaan pimpinan	4 (PUAS)	4,458 (PUAS)	111.45%	12.345.191.681	10.781.761.195	87.33	
2.	Terwujudnya penatausahaan	Persentase Penatausahaan keuangan	100%	100%	100%	83.417.290.750	57.061.930.630	68.40	

No.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		IndikTOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
	keuangan dan aset yang akuntabel	yang sesuai peraturan (PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah)							
		Persentase Penatausahaan Aset Setda yang sesuai dengan Peraturan (PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah)	100%	100%	100%				
3.	Terwujudnya penggunaan aset yang optimal	Persentase Aset yang termanfaatkan	80%	98,62%	100%	16.870.937.160	15.654.773.708	92.70	
4.	Terwujudnya Pelayanan Kedinasan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan keprotokolan KDH/WKDH yang sesuai standar	100%	100%	100%	5.359.045.000	4.659.746.996	86.95	
		Persentase layanan komunikasi dan materi KDH/WKDH yang sesuai standar	100%	100%	100%	1.493.892.800	979.394.561	65.59	
5.	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian dan Perencanaan yang optimal	Persentase administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	100%	100%	100%	85.112.300	77.811.569	91.42	
		Persentase administrasi perencanaan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	210.813.500	172.765.100	81.95	

No.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		IndikTOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas Di Bidang Pemerintahan	Persentase kerjasama yang terealisasi	100%	100%	100%	232.765.000	227.156.499	97.59	Sangat Efisien
		Rangking nasional LPPD	Rangking 7	-	-	652.582.200	478.397.108	72.30	Sangat Efisien
7	Mewujudkan Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase perangkat daerah yang disederhanakan struktur organisasinya	100%	100%	100%	283.307.300	280.723.944	99.08	Sangat Efisien
		Nilai SAKIP	BB	BB		387.743.200	370.304.915	95.50	Sangat Efisien
		Nilai RB	B	BB					
		Persentase peta proses bisnis perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	100%	111.935.800	100.289.341	89.59	Sangat Efisien
8	Terwujudnya Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat Yang Optimal	Persentase Urusan Pelayanan Dasar yang terpenuhi	100%	100%	100%	37.110.190.918	12.998.947.920	30.02	
		Persentase Urusan Non Pelayanan Dasar yang terpenuhi	100%	100%	100%	400.499.500	275.234.150	68.72	
		Persentase pelayanan keagamaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	35.837.703.500	22.951.025.725	64.04	
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang berkualitas di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	100%	100%	100%	1.000.287.800	997.662.855	99.73	
		2. Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas							
		2. Persentase Kasus Hukum Litigasi yang							

No.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		IndikTOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
		dimenangkan ditingkat Pertama							
		3. Persentase Kasus Hukum Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding							
		4. Persentase Kasus Hukum Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi							
		5. Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi							
		6. Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di Web JDIH Media Sosial							
10	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang berkualitas	Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	1.992.919.190	1.656.567.950	83.12	
		Persentase Peningkatan Kontribusi Deviden BUMD	0,6%	2,5%	2,5%	-	-	-	
11	Terwujudnya kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat	Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3	Level 3 (8/9)	88,89%	3.026.790.900	2.546.137.647	84.12	
12	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	389.135.900	351.752.560	90.39	

2.3 Isu-Strategis Perangkat Daerah

Sejak dikeluarkannya Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur, dan Struktur Organisasi lingkup Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang di perkuat dengan Pergub No. 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai OPD mengalami perubahan Tugas dan fungsi serta struktur organisasinya. Perubahan ini tentu memunculkan permasalahan yang menjadi isu-isu strategis bagi Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis dalam RPJMD yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan, Administrasi Keuangan, dan Pengelolaan BMD Lingkup Setda Provinsi NTB belum optimal; (*Biro Umum*)
2. Pelayanan komunikasi pimpinan dan pelayanan keprotokolan belum optimal; (*Biro Administrasi Pimpinan*)
3. Belum optimalnya penerapan Sakip PD dikarenakan kinerja sebagaian PD belum sepenuhnya berorientasi pada hasil/*outcome* dan praktek penganggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja; (*Biro Organisasi*)
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik PD yang menerapkan sistem informasi pelayanan publik (SIPP); (*Biro Organisasi*)

5. Belum optimalnya penataan kelembagaan PD karena perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (*Biro Organisasi-Penataan Daerah*)
6. Belum optimalnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan dan OTDA;
7. optimalisasi fasilitasi pembinaan mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
8. Penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi serta uji materi peraturan perundang-undangan, dokumentasi naskah hukum lainnya, penyusunan fasilitasi dan evaluasi produk hukum provinsi dan kabupaten/kota belum optimal (*Biro Hukum*)
9. Proses pelelangan pengadaan barang jasa belum optimal;
10. Pelaksanaan pengendalian pembangunan belum optimal

Untuk menjawab isu-isu tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran, misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, bahwa Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan program prioritas daerah pada perangkat daerah lingkup setda provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah diakomodir. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini

2.4 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Fasilitas Pimpinan dan Tingkat Layanan Penatausahaan, keuangan dan Aset		100,00				100,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Mataram		582.230.650,51				640.453.715,56
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	Mataram	14	116.468.156,74	DAU		14	128.114.972,41
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Mataram	13	104.678.654,47	DAU		13	115.146.519,92
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Mataram	13	104.658.008,04	DAU		13	115.123.808,84
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPASKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD	Mataram	12	63.679.824,73	DAU		12	70.047.807,20
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	Mataram	12	62.335.612,17	DAU		12	68.569.173,39
4.01.01.1.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan kinerja yang disusun	Mataram	9	91.788.950,55	DAU		9	100.967.845,61
4.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Mataram	6	38.621.443,81	DAU		6	42.483.588,19

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Mataram						
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mataram		151.057.455.834,00	DAU			166.163.201.417,40
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN penerima Gaji dan Tunjangan	Mataram	6,958	150.380.487.210,43	DAU		6,958	165.418.535.931,47
4.01.04.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah ASN pelaksana tugas	Mataram	66	277.524.899,66	DAU		66	305.277.389,63
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Mataram	3	109.216.470,77	DAU		3	120.138.117,85
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan akuntansi SKPD	Mataram	10	127.692.934,45	DAU		10	140.462.227,90
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan keuangan akhir tahun SKPD	Mataram	8	107.931.065,97	DAU		8	118.724.172,57
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Mataram	63	49.454.005,74	DAU		63	54.399.406,31
4.01.01.1.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Mataram	12	5.149.246,98	DAU		12	5.664.171,68
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Mataram		703.681.126,56	DAU			774.049.239,22

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Mataram	7	71.151.117,09	DAU		7	78.266.228,80
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang milik SKPD	Mataram	1	389.207.728,58	DAU		1	428.128.501,44
4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	1	55.935.039,37	DAU		1	61.528.543,31
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Laporan BMD SKPD	Mataram	9	98.313.167,28	DAU		9	108.144.484,01
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	Mataram	3	89.074.074,24	DAU		3	97.981.481,66
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Mataram		83.944.880,96	DAU			92.339.369,06
4.01.01.1.06.01	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Mataram	146	83.944.880,96	DAU		196	92.339.369,06
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah	Mataram		5.705.469.732,14	DAU			6.276.016.705,35
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Komponen/Peralatan Listrik yang disediakan	Mataram	24	49.830.350,81	DAU		24	54.813.385,89

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Mataram	56	512.255.834,09	DAU		61	563.481.417,50
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jenis perlengkapan rumah tangga yang diadakan	Mataram	51	236.894.641,76	DAU		51	260.584.105,94
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis logistik yang disediakan	Mataram	252	575.615.956,21	DAU		273	633.177.551,83
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Mataram	110	264.104.919,25	DAU		122	290.515.411,18
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	Mataram	126	287.924.277,22	DAU		126	316.716.704,94
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	Mataram	23,645	2.173.173.164,70	DAU		23,79	2.390.490.481,17
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Mataram	895	1.944.318.454,36	DAU		935	2.138.750.299,80
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah surat dan arsip yang dikelola	Mataram	6,9	236.968.089,95	DAU		6,9	260.664.898,95
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Mataram		1.996.985.603,02	DAU			2.196.684.163,32
4.01.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Mataram	5	246.057.579,99	DAU		6	270.663.337,99
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Mataram	20	480.630.422,42	DAU		21	528.693.464,66

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Meubeler		Jumlah pengadaan meubelair	Mataram	51	185.676.034,09	DAU		51	204.243.637,50
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan/mesin	Mataram	51	906.229.821,03	DAU		52	996.852.803,13
4.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset tak berwujud		Jumlah asset tak berwujud	Mataram	3	123.028.789,99	DAU		3	135.331.668,99
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Mataram	5	55.362.955,50	DAU		5	60.899.251,05
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	Mataram		14.339.117.060,75	DAU			15.773.028.766,83
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang dikelola	Mataram	9,75	166.409.602,55	DAU		10,005	183.050.562,81
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	Mataram	40	2.595.907.468,84	DAU		40	2.855.498.215,72
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	25	690.025.422,99	DAU		25	759.027.965,29
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Kontrak untuk Pelayanan Umum	Mataram	375	10.886.774.566,37	DAU		375	11.975.452.023,01
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Mataram		7.076.208.775,10	DAU			7.783.829.652,61

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dikelola	Mataram	230	1.165.091.253,25	DAU		23	1.281.600.378,58
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Mataram	27	3.299.137.571,87	DAU		27	3.629.051.329,06
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan mebeluer		Jumlah Meubeler yang dipelihara	Mataram	15	4.921.151,61	DAU		15	5.413.266,77
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Mataram	369	509.142.344,51	DAU		384	560.056.578,96
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Mataram	2	1.854.171.815,13	DAU		2	2.039.588.996,64
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab	Mataram	3	243.744.638,73	DAU		3	268.119.102,60
	BIRO UMUM									
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Mataram		7.998.627.655,62				8.798.490.421,19
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	Mataram	28 OB	3.654.039.368,26	DAU			4.019.443.305,09

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Mataram	60 Stel	541.138.687,98	DAU			595.252.556,77
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mataram	4 Kali	196.846.063,99	DAU			216.530.670,39
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dana Penunjang Operasional yang terbayar	Mataram	24 OB	3.606.603.535,40	DAU			3.967.263.888,94
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					11.557.381.125,15	DAU			12.713.119.237,67
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur	Mataram	12 kali	4.746.574.853,96	DAU			5.221.232.339,36
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Mataram	12 kali	3.177.754.784,06	DAU			3.495.530.262,46
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	Mataram	12 kali	3.633.051.487,13	DAU			3.996.356.635,84
										-
	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN									
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Materi dan komunikasi pimpinan yang Terfasilitasi	Mataram	289	2.186.870.452,01	DAU	306		2.405.557.497,21
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah materi Pimpinan yang tersusun	Mataram	105	538.140.230,31	DAU	110		591.954.253,34

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah sambutan yang tersusun	Mataram	740	670.506.905,46	DAU	760		737.557.596,01
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Jumlah kegiatan Pimpinan yang terdokumentasi	Mataram	1100	978.223.316,24	DAU	1200		1.076.045.647,86
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Fasilitasi keprotokolan	Mataram	1,38	2.593.170.078,27	DAU	2600		2.852.487.086,09
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi	Mataram	1100	596.671.177,15	DAU	1200		656.338.294,86
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi	Mataram	180	397.124.631,22	DAU	200		436.837.094,34
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah kegiatan Pimpinan yang terlaksana	Mataram	1100	1.599.374.269,90	DAU	1200		1.759.311.696,89
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	NTB	30%	46.504.882,62	DAU		30%	51.155.370,88
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Melaksanakan Kegiatan Pengendalian pada OPD Bidang Ekonomi, Sosbud, Kesra, Infrastruktur dan Tata Ruang Yang Pelaksanaan APBD/APBD nya sesuai Target	Presentase OPD Bidang Ekonomi, Sosbud, Kesra, Infrastruktur dan Tata Ruang Yang Pelaksanaan APBD/APBD nya sesuai Target	NTB	30%	1.953.697.185,08	DAU		30%	2.149.066.903,59

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	NTB	4 Laporan	1.180.982.266,90	DAU		4 Laporan	1.299.080.493,60
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	NTB	4 Laporan	582.062.984,68	DAU		4 Laporan	640.269.283,15
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kegiatan Bantuan Keuangan di Kab/ Kota Wilayah I/II Yang Pelaksanaannya Sesuai Target	Presentase Jumlah Kegiatan Bantuan Keuangan di Kab/ Kota Wilayah I/II Yang Pelaksanaannya Sesuai Target	NTB	4 Laporan	300.559.949,10	DAU		4 Laporan	330.615.944,01
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Menyusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	NTB		772.714.918,18	DAU			849.986.410,00
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Menyusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	NTB	4 Laporan	181.549.648,47	DAU		4 Laporan	199.704.613,32
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Menyusun Laporan Hasil Analisis	Jumlah Laporan Hasil Analisis	NTB	4 Laporan	393.169.870,76	DAU		4 Laporan	432.486.857,84
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Menyusun Bahan Rumusan Kebijakan	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	NTB	4 Laporan	197.995.398,94	DAU		4 Laporan	217.794.938,84

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pembangunan Daerah								
	BIRO PBJ									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					5.403.461.242,08				5.943.807.366,29
4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	NTB	Level 3	5.403.461.242,08	DAU		Level 3	5.943.807.366,29
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			NTB		3.688.624.452,77	DAU	Melaksanakan amanat Permen dagri No. 56 Tahun 2019		4.057.486.898,05
4.01.07.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Makan dan Minum Rapat (rakor)	Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	NTB	2 dokumen	182.991.053,77	DAU		2 dokumen	201.290.159,15
		Belanja Barang dan Jasa (rakor)					DAU			
		Belanja Modal								
4.01.07.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa (Honorarium perangkat UKPBJ)	Persentase Lelang Sesuai Pengajuan OPD	NTB	90%	3.222.763.144,47	DAU		90%	3.545.039.458,92
		Belanja Modal								
4.01.07.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Jasa (honorarium Tepra)	Laporan Pemantauan dan Evaluasi	NTB	1 Laporan	282.870.254,53	DAU		1 Laporan	311.157.279,98

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Belanja Makan dan Minum Rapat (Tepre)	Pengadaan Barang dan Jasa							
		Belanja Modal								
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			NTB		795.336.836,94	DAU	Melaksanakan amanat Permen dagri No. 56 Tahun 2019		874.870.520,63
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Standar Pelayanan sesuai standarisasi LPSE	NTB	17 standar	328.702.538,75	DAU		17 standar	361.572.792,63
		Belanja Makan dan Minum Rapat								
		Belanja Modal								
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikembangkan	NTB	2 aplikasi	236.420.365,78	DAU		2 aplikasi	260.062.402,36
		Belanja Makan dan Minum Rapat								
		Belanja Modal								
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah Informasi Pengadaan Barang/Jasa	NTB	1 Laporan	230.213.932,41	DAU		1 Laporan	253.235.325,65
		Belanja Makan dan Minum Rapat								
		Belanja Modal								
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			NTB		919.499.952,37	DAU	Melaksanakan amanat Permen dagri No. 56 Tahun 2019		662.475.315,38

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah SDM terlatih	NTB	100 orang	200.465.570,99	DAU		100 orang	220.512.128,09
		Belanja Makan dan Minum Rapat (Pembinaan SDM PBJ)								
		Belanja Modal								
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa (Rakor UKPBJ)	Jumlah kab/kota terbina	NTB	10 kab/kota	171.570.783,31	DAU		10 kab/kota	188.727.861,64
		Belanja Makan dan Minum Rapat (Rakor UKPBJ)								
		Belanja Modal								
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa (Bimtek SIRUP,SIKAP, E MONEV, LPSE)	Jumlah Pelaku Pengadaan terlatih	NTB	200 orang	547.463.598,07	DAU		200 orang	253.235.325,65
		Belanja Makan dan Minum Rapat (Bimtek SIRUP,SIKAP, E MONEV, LPSE)								
		Belanja Modal								
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT (Persentase)		Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar		100	107.560.246.984	DAU		100	118.316.271.682,40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.04.01.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual (Kali)		Jumlah Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	NTB	795	36.882.873.169	DAU		800	40.571.160.485,90
4.01.04.01.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual (Kali)	- Pelaksanaan Kegiatan Hari-Hari Besar Islam: 1. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1443H 2. Hari Raya Idul Fitri 1443H 3. Nuzulul Qur'an 17 Ramadhan 1443H 4. Hari Raya Idul Adha 1443H 5. Tahun Baru Hijriah 1444 H 6. Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H - Safari Ramadhan Mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur - Pengadaan Hewan Qurban (Sapi dan Kambing) - Fasilitasi Embarkasi Haji Provinsi NTB dan PHD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Provinsi NTB	790	33.062.713.593	DAU		795	36.368.984.952

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(Pemadu Haji Daerah) - Imtaq di Masjid Al-Amin Lingkungan Kantor Gubernur NTB - Imtaq di Pendopo Gubernur dan Wakil Gubernur - Shalat Jum'at di Masjid Al-Amin Lingkungan Kantor Gubernur NTB - Kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Terbatas - Kegiatan STQ Tingkat Provinsi - Kegiatan MTQ Tingkat Nasional - Pelaksanaan TC Untuk Peserta STQ Tingkat Provinsi - Honorarium Sekretariat LPTQ Provinsi - Hibah Barang/Uang untuk Rumah								

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Ibadah/Lembaga Keagamaan - Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Hibah Barang/Uang								
4.01.04.01.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spritual (Lembaga)	- Hibah Uang untuk Lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama - Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Hibah Barang/Uang - Koordinasi dengan FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Bina Spritual Yang Terfasilitasi	Provinsi NTB	5	3.820.159.576	DAU	SKB Dua Menteri (Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri)	5	4.202.175.533,60
4.01.04.01.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar		15	69.920.787.480	DAU		15	76.912.866.228
4.01.04.01.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan (Dokumen)	- Pelaksanaa n Lomba Sekolah/ Madrasah Sehat Tingkat Provinsi - Pembinaan dan Pendampingan Lomba Sekolah/ Madrasah Sehat Tingkat Nasional	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Provinsi NTB	4	68.624.260.142	DAU		4	76.912.866.228

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Fasilitas Beasiswa NTB (Dalam dan Luar Negeri) - Sertifikasi Calon Penerima Beasiswa NTB (Kelas TOEFLE, Kelas IELTS, Kelas EPT) - Bibah Uang kepada Lembaga Kependidikan - Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Warga NTB - Monitoring, Evaluasi, Verifikasi Hibah Uang Lembaga Kependidikan								
4.01.04.01.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan (Dokumen)	- Workshop TPKJM (Tim Pengendalian Kesehatan Jiwa Masyarakat) - Workshop Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Lainnya - Workshsop/Rapat Koordinasi Pencegahan Penyakit Menular/Mewabah	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Provinsi NTB	8	1.112.020.324	DAU		8	1.223.222.356

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Workhsop/R apat Koordinasi Narkoba/P4GN - Workhsop/R akor/Monev dan Pembinaan Revitalisasi Posyandu Keluarga - Sosialisasi HIV-AIDS di Masyarakat/ Sekolah/ Ponpes - Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) / Koordinasi Pokja HIV-AIDS - Penguatan Organisasi Populasi Kunci (Popci)/ Koordinasi Internal Pokja I-VI - Honorarium Sekretariat KPAD Provinsi								
4.01.04.01.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial (Dokumen)	- Workshop/R apat Koordinasi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	Provinsi NTB	3	184.507.014	DAU		3	202.957.715

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.04.01.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Dokumen)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		3	756.586.335	DAU		3	832.244.969
4.01.04.01.03.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dokumen)	- Workshop / Rapat Koordinasi Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Provinsi NTB	1	314.567.884	DAU		1	346.024.672
		- Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan								
4.01.04.01.03.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dokumen)	- Workshop / Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Provinsi NTB	1	155.949.325	DAU		1	171.544.258
		- Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan								

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.04.01.03.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan (Dokumen)	- Workshop / Rapat Koordinasi Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan - Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan - Honorarium Pengelolaan Teknologi Informasi Berbasis Online (Website, Medsos, dll)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kemonikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Provinsi NTB	1	286.069.126	DAU		1	314.676.039
BIRO HUKUM										
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					2.105.164.202,90				2.315.680.623
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah	NTB		1.433.675.650,73	DAU			1.577.043.216
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	- Melakukan pengkajian dan harmonisasi Rancangan Perda	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	NTB	10 Perda	344.480.488,95	DAU	Melaksanakan amanat Permen	10 Perda	378.928.538

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Melakukan Asistensi Rancangan Perda - Melakukan pengkajian dan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah			30 Pergub			dagri Nomor 80 Tahun 2015 dan permendagri 120 Tahun 2018	30 Pergub	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Melakukan Pengkajian dan harmonisasi Rancangan Keputusan	Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	NTB	700 Kept Gub	172.239.813,87	DAU	Melaksanakan amanat Permen dagri Nomor 80 Tahun 2015 dan permendagri 120 Tahun 2018	700 Kept Gub	189.463.795
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya	- Sosialisasi Produk Hukum daerah kepada masyarakat	- Jumlah Produk Hukum yang terdokumentasi dan Tersosialisasi kepada masyarakat	NTB	10 Perda	449.446.192,00	DAU	- Perpres Nomor 33 Tahun 2012 ttg JDIH	4 Produk Hukum	494.390.811
		- Penyusunan MoU dan Perjanjian	- Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun		25 Naskah			- Permen dagri nomor	10 Perda/30 pergub 25 Naskah	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kerjasama Daerah						22 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 56 Tahun 2020		
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota	Hasil Kajian Raperda dan Raperbup Kab./Kota dalam bentuk matrik atau surat hasil evaluasi dan Fasilitasi Raperda/Raperbup	- Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan Terevaluasi	NTB	50 Perda 100 Perbup/Perwal	467.509.155,91	DAU	Melaksanakan amanat Permen dagri Nomor 120 Tahun 2018	50 Perda 100 Perbup/Perwal	514.260.072
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Terlaksananya fasilitasi penanganan kasus-kasus hukum	NTB		671.488.552,17	DAU			738.637.407
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Penyelesaian Kasus-kasus Hukum baik Perdata/TUN melalui Litigasi/Peradilan	- Jumlah Penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	NTB	4 Perkara	332.544.358,77	DAU	Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht) dan mengikat pihak	4 Perkara	365.798.795
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	- Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi melalui	- Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	NTB	4 Perkara	338.944.193,40	DAU	Melaksanakan amanat Permen dagri	4 Perkara	372.838.613

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		mekanisme mediasi						Nomor 12 Tahun 2014		

	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH									
4.01.02.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	Prov. NTB	100	3.486.205.307,63	DAU		100	3.834.825.838
4.01.02.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	Prov. NTB	1	1.021.138.956,94	DAU		1	1.123.252.853
4.01.02.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Monev pelaksanaan Dekon TP	Frekuensi monev pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	Prov. NTB	10	292.036.145,44	DAU		40	321.239.760
		Pelaksanaan Rakor Dekon TP	Rakor pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	Prov. NTB	4				4	-
		Penyusunan laporan pelaksanaan Dekon TP	dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	Prov. NTB	4				4	-
		Pelaksanaan Rakor pertanahan	jumlah rakor pertanahan yang dilakukan	Prov. NTB	2				2	-
		monev kegiatan pertanahan di Kab/Kota	jumlah monev pertanahan	Prov. NTB	10				10	-
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Rakor pimpinan daerah	jumlah rakor pimpinan daerah	Prov. NTB	2	264.929.950,31	DAU		2	291.422.945

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		penyusunan dokumen daerah rawan bencana, ketentraman dan ketertiban	jumlah dokumen pemetaan daerah rawan bencana, ketentraman dan ketertiban	Prov. NTB	2				2	-
		Pelaksanaan Rakor daerah rawan bencana dan trantibum	Jumlah rakor daerah rawan bencana dan trantibum	Prov. NTB	2				2	-
		penyusunan dokumen laporan pelaksanaan SPM	jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM	Prov. NTB	1				1	-
4.01.02.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Penegasan segmen batas secara pasti di lapangan	jumlah segmen batas yang sudah ditegaskan secara pasti	Prov. NTB	2	464.172.861,19	DAU		2	510.590.147
		Fasilitasi pemekaran wilayah desa menjadi desa persiapan	jumlah penataan wilayah yang ditata	Prov. NTB	30				20	-
		fasilitasi pelaksanaan pembakuan unsur rupa bumi	jumlah rupa bumi yang difasilitasi untuk dibakukan	Prov. NTB	2				2	-
4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah		jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	Prov. NTB	1	1.811.502.355,04	DAU		1	1.992.652.591
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi administrasi PAW, Ijin ke luar negeri, pelantikan, cuti Kepala Daerah dan DPRD	jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan DPRD	Prov. NTB	20	710.814.581,87	DAU		20	781.896.040
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Fasilitasi usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru	Jumlah DOB yang difasilitasi	Prov. NTB	3	239.906.140,49	DAU		3	263.896.755

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penyusunan dokumen pengembangan otonomi dan penataan urusan	jumlah dokumen fasilitasi pengembangan otonomi dan penataan urusan	Prov. NTB	1				1	-
		Pelaksanaan Rakor Hari jadi Provinsi dan koordinasi Kab/Kota	Rapat koordinasi pelaksanaan Hari Jadi Provinsi dan koordinasi Kabupaten/Kota	Prov. NTB	6				6	-
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan LPPD dan LKPJ	jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	Prov. NTB	2	860.781.632,69	DAU		2	946.859.796
		Penyusunan dokumen Peningkatan kapasitas daerah	dokumen pengembangan peningkatan kapasda	Prov. NTB	1				1	-
		Evaluasi LPPD Kab.Kota	dokumen EPPD Kab/Kota	Prov. NTB	10				10	-
		Penyebaran informasi LPPD melalui media cetak	jumlah Dokumen informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat	Prov. NTB	1				1	-
4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah		jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	Prov. NTB	1	653.563.995,65	DAU		1	653.563.995,65
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Pembayaran iuran kerjasama MPU,APPSI dan Provinsi Kepulauan	jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan	Prov. NTB	3	280.719.096,13			3	280.719.096,13
		melakukan fasilitasi kerjasama antar pemerintah	jumlah dokumen kerjasama antar pemerintah	Prov. NTB	10				10	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	melakukan fasilitasi kerjasama dengan	jumlah dokumen kerjasama dengan Badan Usaha/swasta	Prov. NTB	5	173.982.885,77	DAU		5	173.982.885,77

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Swasta/Badan Usaha								
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Evaluasi pelaksana kerjasama yang telah dilakukan	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	Prov. NTB	15	198.862.013,74	DAU		15	198.862.013,74
	BIRO ORGANISASI									
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI (Termasuk:SAKIP Level A)		Nilai Sakip OPD			1.412.262.367	DAU			1.412.262.367
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Presentase Kelembagaan perangkat daerah dan dokumen analisis jabatan yang sesuai ketentuan	NTB		498.328.606	DAU			548.161.467
4.01.02.1.01 01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan	NTB	3 Dokumen	215.079.792	DAU		3 Dokumen	236.587.771
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kelembagaan tentang UPTD/UPTB dan Cabang Dinas	Jumlah dokumen UPTD/UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi		3 Dokumen				3 Dokumen	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perangkat daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	NTB	22 Dokumen	103.733.324	DAU		22 Dokumen	198.862.013,74

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Fasilitasi Pendampingan penyusunan anjab dan ABK Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun dan Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun	NTB	49 Dokumen	179.515.490	DAU		49 Dokumen	197.467.040
		Fasilitasi Pendampingan Data Jabatan Struktural lingkup Provinsi								
		Fasilitasi pendampingan Penyusunan Dokumen Penyederhanaan Birokrasi/Pemetaan Transformasi Jabatan lingkup Pemerintah Provinsi NTB								
		Validasi Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Kab/Kota								
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Presentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja yang baik	NTB		913.933.761	DAU			1.005.327.136,91
4 01 02 1.02 01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan	Jumlah Kab/Kota yang Nilai PMPRB baik	NTB	10 Kab/Kota	236.215.400	DAU		10 Kab/Kota	259.836.940

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Reformasi Birokrasi								
		Fasilitasi Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Kab/Kota	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi		Nilai A (>80-90)				Nilai A (>80-90)	
4 01 02 1.02 02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Dokumen IKU Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat daerah dan Jumlah Laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	NTB	43 Dokumen dan Laporan	225.755.369	DAU		43 Dokumen dan Laporan	248.330.906
		Penyusunan dokumen LKjIP/SAKIP/LAKIP Provinsi								
		Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Provinsi								
		Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi								
4 01 02 1.02 03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kinerja	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan Tata Naskah Dinas Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kinerja baik	NTB	43 OPD	98.332.852	DAU		43 OPD	108.166.137,08
4 01 02 1.02 04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Fasilitasi Pendampingan Penyusunan SOP Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP Tata Kelola Pemerintahan	NTB	43 OPD	89.390.873	DAU		43 OPD	98.329.960,71

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 01 02 1.02 05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)	Jumlah Inovasi pelayanan publik yang dimanfaatkan	NTB	20 Inovasi	264.239.267	DAU		20 Inovasi	290.663.193
		Pembinaan Unit Kerja Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan			43 OPD				43 OPD	
	BIRO EKONOMI									
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian	NTB	100	2.717.302.190,45			100	2.989.032.409,50
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah rumusan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian	NTB		767.295.869,07	DAU			844.025.455,98
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Melaksanakan Koordinasi / konsultasi	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro	NTB	2	361.276.748,45	DAU		2	397.404.423,30
		Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi								
		Mekasanakan FGD								
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Bahan kebijakan ekonomi Mikro	NTB	2	406.019.120,62	DAU		2	446.621.032,68
		Mekasanakan FGD								
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah rumusan bahan Kebijakan Sumber Daya Alam	NTB		738.172.739,96	DAU			811.990.013,96

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan kegiatan FGD	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan	NTB	2	369.086.369,98	DAU		2	405.995.006,98
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan mineral dan Lingkungan Hidup	Melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan kegiatan FGD	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan mineral dan Lingkungan Hidup	NTB	2	184.543.184,99	DAU		2	202.997.503,49
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	- Melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan kegiatan FGD	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Energi dan Air	NTB	2	184.543.184,99	DAU		2	202.997.503,49
		- Membuat Regulasi baru dan Telaahan bahan kebijakan								
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang disusun.	NTB		1.211.833.581,42	DAU			1.333.016.939,56
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	- Melaksanakan Koordinasi / konsultasi	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	NTB	2	904.261.606,45	DAU		2	994.687.767,10
		- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi								

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		- Melakukan Rapat Teknis								
		- Melakukan Pembinaan kepada seluruh BUMD di Provinsi NTB								
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	- Melaksanakan Koordinasi / konsultasi	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	NTB	2	123.028.789,99	DAU		2	135.331.668,99
		- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi								
		- Melakukan Rapat Teknis								
4.01.06.1.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	- Melaksanakan Koordinasi / konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	NTB	2	92.271.592,49	DAU		2	101.498.751,74
		- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi								
		- Melakukan Rapat Teknis								
		- Melakukan Pembinaan kepada seluruh BUMD di Provinsi NTB								

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	- Melaksanakan Koordinasi / konsultasi	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	NTB	2	92.271.592,49	DAU		2	101.498.751,74
		- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi								
		- Melakukan Rapat Teknis								
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	- Melaksanakan Koordinasi / konsultasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	NTB	2	92.271.592,49	DAU		2	101.498.751,74
		- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi								
		- Melakukan Rapat Teknis								

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan Tahun 2024 yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun stake holder lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 tidak memiliki usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026 merupakan fase kelima atau terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005- 2025, sehingga tahun 2024 diharapkan dapat menuntaskan agenda pencapaian target nasional yang ditetapkan untuk wilayah Provinsi NTB.

Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan di tingkat nasional dan daerah berdasarkan dokumen RPD Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 dijabarkan sebagai berikut:

a. **RPJMN Tahun 2020-2024**

Penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas

pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. RPJPD 2005 – 2025

Penyusunan RPD Tahun 2024 – 2026 berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan fase kelima dari perencanaan pembangunan daerah tahun 2005 – 2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada arah pembangunan yang diamanatkan dalam RPJPD.

c. RTRW 2023 – 2043

Penyusunan RPD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat RPD NUSA TENGGARA BARAT 2024-2026 I-5 Tahun 2023 – 2043 (draf Rancangan Perda RTRW 2023 – 2043 dalam proses pembahasan DPRD).

d. RKPD RPD Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026

Pedoman dalam penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.

e. RENSTRA PERANGKAT DAERAH Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026

Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026. Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA

Tolok ukur Rencana Kinerja serta capaian per-program yang mencakup program prioritas pada lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara mengacu pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sehingga tahun 2024 merupakan tahun pertama periode RENSTRA Tahun 2024-2026, sebagaimana telah ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Sasaran rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 yang mengacu pada Sasaran RENSTRA PD Tahun 2024-2026 dimana menyajikan keterkaitan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dengan kabupaten dan kota, diatur berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dimana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, diselenggarakan berdasarkan kriteria tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Salah satu yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah, berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah. Tujuan, dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang merupakan sasaran yang tertuang dalam RPD .

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program biro-biro. Berikut tabel sasaran strategis yang ada di RPD yang menjadi acuan Sekretariat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Tabel 3.1
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

RENSTRA 2024-2026			RPD 2024-2026		
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran
Biro Umum & Biro Adpim					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas di Bidang Layanan Pimpinan dan Umum	Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal	1. Persentase Layanan Pimpinan sesuai Standar 2. Persentase Layanan Umum sesuai Standar	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan , akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai Sakip
Biro Pemerintahan Dan Otda					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Meningkatny a kualitas tata kelola pemerintaha n daerah bidang Pemerintaha n dan Otonomi Daerah	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan , akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP
	Meningkatny a jumlah perjanjian kerja sama	persentase nota kesepahaman yang ditindak lanjuti menjadi perjanjian kerjasama			
Biro Kesejahteraan Rakyat					
Terwujudnya fasilitasi pelayanan	Meningkatny a Efektivitas Fasilitasi	Persentase Fasilitasi Pelayanan Bidang	Terwujudnya peningkatan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

RENSTRA 2024-2026			RPD 2024-2026		
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran
bidang kesejahteraan rakyat	Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat	kesejahteraan rakyat (<u>Indikator Tujuan</u>)	pembangunan manusia		
		Persentase fasilitasi pelayanan keagamaan , urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (%) (Indikator Sasaran)		Menurunnya Angka Prevalensi Stunting	Persentase Balita Stunting (SSGI)
				Meningkatnya karakter/ketaqwaan sumber daya Manusia	Pendidikan karakter
			Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya pelayanan publik	Ketersediaan standar pelayanan
Biro Organisasi					
Terwujudnya efektivitas, tata kelola pemerintahan daerah bidang penataan organisasi	Mewujudkan Efektifitas Penataan Organisasi	1. Persentase Kelembagaan PD sesuai ketentuan 2. Persentase Dokumen analisis jabatan sesuai standard 3. Nilai PMPRB Daerah Prov. NTB 4. Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibina menerapkan SIPP	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan , akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai Sakip

RENSTRA 2024-2026			RPD 2024-2026		
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran
Biro Perekonomian					
Terwujudnya efektifitas tata kelola pemerintah Daerah Bidang Kebijakan Perekonomian , BUMD,BLUD dan Pengelola SDA	Meningkatnya efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Kebijakan	Persentase rumusan kebijakan perekonomian	Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan dihasilkan
Biro Hukum					
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas di Bidang Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah bidang Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas 2. Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas 3. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama 4. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding 5. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi 6. Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan , akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai Sakip

RENSTRA 2024-2026			RPD 2024-2026		
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran
		melalui mediasi 7. Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas			
Biro Administrasi Pembangunan					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas di sektor administrasi pembangunan	Persentase peningkatan indeks reformasi birokrasi	NILAI SAKIP Setda Prov NTB	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berkualitas di sektor administrasi pembangunan	Persentase peningkatan indeks reformasi birokrasi	Nilai SAKIP Setda Prov NTB
Biro PBJ					
Terwujudnya ekonomi yang berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik	Nilai Sakip

Tabel 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas di Bidang Layanan Pimpinan dan Umum	Hasil Survey Kepuasan Layanan Pimpinan dan Layanan Umum							
			1. Terwujudnya Layanan Umum dan Layanan Pimpinan yang Optimal	1. Persentase Layanan Pimpinan sesuai Standar	100	100	100	$\frac{\text{jumlah pemenuhan kebutuhan layanan pimpinan}}{100\%} \times \text{jumlah kebutuhan layanan pimpinan}$	Biro Umum, Biro Adpim
				2. Persentase Layanan	100	100	100	jumlah pemenuhan kebutuhan	Biro Umum,

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
				Umum Sesuai Standar				layanan umum $\frac{\text{_____}}{100\%} \times \text{jumlah kebutuhan layanan umum}$	Biro Adpim
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3. Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (3,41-3,70)	Tinggi (3,71-4,20)	Sangat Tinggi (4,21-4,50)	Penilaian diberikan oleh Kemendagri	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3	Terwujudnya efektivitas, tata kelola pemerintahan daerah bidang penataan organisasi	persentase SAKIP Perangkat Daerah bernilai A	Mewujudkan Efektifitas Penataan Organisasi	1. Persentase Kelembagaan PD sesuai ketentuan	100	100	100		Biro Organisasi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
				2. Persentase Dokumen analisis jabatan sesuai standard	100	100	100		
				3. Nilai PMPRB Daerah Prov. NTB	BB	BB	A		
				4. Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibina menerapkan SIPP	100	100	100		
4	Terwujudnya fasilitasi pelayanan bidang kesejahteraan rakyat		1. Meningkatkan Efektivitas Fasilitasi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5. Persentase Fasilitasi Pelayanan Bidang kesejahteraan rakyat (Indikator Tujuan)	100	100	100		Biro Kesejahteraan Rakyat

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
				6. Persentase fasilitasi pelayanan keagamaan , urusan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar (%) (Indikator Sasaran)	100	100	100		Biro Kesejahteraan Rakyat
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berkualitas di Bidang Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum yang berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah bidang Bidang Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	7. Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	100	100	100	Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas dibagi Jumlah Produk Hukum dikali 100 %	Biro Hukum
				8. Persentase Produk Hukum Daerah	100	100	100	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas dibagi Jumlah Produk Hukum dikali 100 %	Biro Hukum

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
				Kab./Kota yang berkualitas					
				9. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	100	100	100	Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani dibagi yang dimenangkan ditingkat Pertama dikali 100 %	Biro Hukum
				10. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding	100	100	100	Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani dibagi yang dimenangkan ditingkat Banding dikali 100 %	Biro Hukum
				11. Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	100	100	100	Jumlah Perkara Litigasi yang ditangani dibagi yang dimenangkan ditingkat Kasasi dikali 100 %	Biro Hukum
				12. Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan	100	100	100	Jumlah Perkara Non Litigasi yg dimediasi dibagi Perkara hukum non litigasi yang diajukan ke Biro Hukum dikali 100 %	Biro Hukum

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
				melalui mediasi					
				13. Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDIH, Media Sosial yang berkualitas	100	100	100	Jumlah Produk Hukum di Web JDIH dan Medsos yang diakses masyarakat dibagi jumlah Produk Hukum yang diupload di web JDIH dikali 100 %	Biro Hukum
6	Terwujudnya efektifitas tata kelola pemerintah Daerah Bidang Kebijakan Perekonomian, BUMD,BLUD dan Pengelola SDA		2. Meningkatkan efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Kebijakan	14. Persentase rumusan kebijakan perekonomian	100	100	100	Banyaknya rumusan kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti dibagi seluruh rumusan bidang perekonomian X 100	Biro Perekonomian
								Target kontribusi Deviden BUMD dibagi target PAD X 100	
7	Meningkatnya kualitas tata Kelola	Persentase peningkatan indeks	Meningkatnya efektifitas tata kelola	15. Nilai SAKIP Pemprov NTB	BB	A	A		Biro Administrasi Pembangunan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	pembangunan daerah	reformasi birokrasi	dan pengendalian pembangunan daerah						
				16. Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		Biro Administrasi Pembangunan
				17. Cakupan hasil pengendalian pembangunan (%)	30	40	50		Biro Administrasi Pembangunan
8	Terwujudnya ekonomi yang berkeadilan melalui optimalisasi		Meningkatnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	18. Indeks Tata Kelola Pengadaan	75%	77,5%	80%		Biro PBJ

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			Formulasi	Penanggung Jawab
					2024	2025	2026		
	penerapan tata kelola pengadaan		Barang/Jasa a Pemerintah	Barang/Jasa Pemerintah					

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ada beberapa yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunannya antara lain:

1. Menyediakan acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 ;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS serta RAPBD 2024 ;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024

NO.	PROGAM	KEGIATAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
		Fasilitasi Keprotokolan
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
		Pelaksanaan Otonomi Daerah
		Fasilitasi Kerjasama Daerah
4.	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
		Fasilitasi Bantuan Hukum
5.	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
6.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
7.	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
8.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 berisi rancangan program dan kegiatan, yang mendukung, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung, pencapaian sasaran pembangunan daerah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi.

Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Provinsi

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang dibutuhkan agar program kegiatan tersebut dapat terlaksana secara optimal. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan

4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi Pengendalian Pembangunan
7. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
9. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengawasi, mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan koordinasi fungsi Sekretariat Daerah dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur senantiasa memperhatikan RTRW, dimana RTWP merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro ditunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Pekerjaan (Rincian Output)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Output	Rencana Tahun 2024			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1		3	4	5	6	7	8
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Fasilitas Pimpinan dan Tingkat Layanan Penatausahaan, keuangan dan Aset		100,00	103.587.775.503	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Mataram		648542870	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang disusun	Mataram	14	109.961.400	DAU
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Mataram	13	108.814.800	DAU
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD yang disusun	Mataram	13	120.055.000	DAU
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPASKPD		Jumlah dokumen DPA SKPD	Mataram	12	47.912.800	DAU
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	Mataram	12	39.879.700	DAU
4.01.01.1.01.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan kinerja yang disusun	Mataram	9	121.747.620	DAU
4.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Mataram	6	100.171.550	DAU
				Mataram			

4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mataram		65.515.359.883	DAU
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN penerima Gaji dan Tunjangan	Mataram	6,958	64.936.861.623	DAU
4.01.04.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		jumlah ASN pelaksana tugas	Mataram	66	325.725.300	DAU
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Mataram	3	40.867.400	DAU
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan akuntansi SKPD	Mataram	10	28.264.600	DAU
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen Laporan koordinasi dan keuangan akhir tahun SKPD	Mataram	8	61.875.860	DAU
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Mataram	63	120.688.100	DAU
4.01.01.1.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Mataram	12	1.080.000	DAU
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Mataram		175.114.175	DAU
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Mataram	7	19.608.800	DAU
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan hasil pengamanan Barang milik SKPD	Mataram	1	80.000.000	DAU
	Koordinasi dan penilaian Barang Milik Daerah					3.140.100	
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Laporan BMD SKPD	Mataram	9	28.437.350	DAU
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah dokumen penatausahaan BMD SKPD	Mataram	3	43.927.925	DAU

4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Mataram		127.360.900	DAU
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Mataram	146	100.360.900	DAU
4.01.01.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Diklat Kepegawaian yang dilaksanakan	Mataram		27.000.000	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum perangkat Daerah	Mataram		5.705.469.732,14	DAU
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jenis Komponen/Peralatan Listrik yang disediakan	Mataram	24	73.948.000	DAU
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Mataram	56	1.266.191.750	DAU
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jenis logistik yang disediakan	Mataram	252	268.951.195	DAU
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Mataram	110	148.125.500	DAU
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	Mataram	126	176.320.000	DAU
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	Mataram	23,645	2.865.031.400	DAU
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Mataram	895	1.956.824.200	DAU
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah surat dan arsip yang dikelola	Mataram	6,9	34.387.920	DAU
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Mataram		1.910.922.500	DAU
4.01.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Mataram	5	1.700.000.000	DAU

4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Mataram			DAU
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Meubeler		Jumlah pengadaan meubelair	Mataram			DAU
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan/mesin	Mataram	51	210.922.500	DAU
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan	Mataram			DAU
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	Mataram		13.670.591.760	DAU
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Surat yang dikelola	Mataram	9,75	18.865.400	DAU
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	Mataram	40	2.571.854.000	DAU
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	25	616.415.000	DAU
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Kontrak untuk Pelayanan Umum	Mataram	375	10.463.457.360	DAU
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Mataram		3.638.960.600	DAU
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dikelola	Mataram	230	568.245.000	DAU
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah unit Kendaraan Dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dikelola	Mataram	27	1.818.218.500	DAU

4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan mebeluer		Jumlah Meubeler yang dipelihara	Mataram			
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Mataram	369	323.487.100	DAU
4.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Mataram	2	755.260.000	DAU
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhab	Mataram	3	173.750.000	DAU
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Mataram		3.192.992.470	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayarkan	Mataram	28 OB	1.258.992.470	DAU
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Mataram	60 Stel	175.000.000	DAU
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan MedicalCheck Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Mataram			
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dana Penunjang Operasional yang terbayar	Mataram	24 OB	1.759.000.000	DAU
4.01.01.1.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					2.974.546.660	DAU
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur	Mataram	12 kali	1.268.206.880	DAU
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Mataram	12 kali	139.716.600	DAU
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat daerah	Mataram	12 kali	1.566.623.180	DAU
4.01.01.1.13	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		Jumlah Materi dan komunikasi pimpinan yang Terfasilitasi	Mataram	289	1.485.433.720	DAU

4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah materi Pimpinan yang tersusun	Mataram	105	368.917.720	DAU
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah sambutan yang tersusun	Mataram	740	179.629.000	DAU
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Jumlah kegiatan Pimpinan yang terdokumentasi	Mataram	1100	936.877.000	DAU
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Fasilitasi keprotokolan	Mataram	1,38	3.458.170.000	DAU
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi	Mataram	1100	678.520.000	DAU
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah tamu KDH/WKDH yang terfasilitasi	Mataram	180	504.650.000	DAU
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah kegiatan Pimpinan yang terlaksana	Mataram	1100	2.275.000.000	DAU
04.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISAI		persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	Mataram	100	674.999.800	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	Mataram	100	54.136.018.880	DAU
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Penyusunan Produk Hukum daerah dan Penyesuaian kasus-kasus Hukum	Mataram	100	930.353.169	DAU
04.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditindak lanjuti	Mataram	100	850.000.000	DAU
04.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Tingkat Kematangan UKPBJ	Mataram	100	2.455.244.000	DAU
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan	Mataram	30%	404.246.000	DAU
4.01.02.1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	Mataram	100	570.000.000	DAU

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh Biro melalui pembahasan-pembahasan di Lingkup Sekretariat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka menengah periode tahun 2023-2024.

Selanjutnya RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun program/kegiatan dalam kerangka penyusunan RAPBD Setda Provinsi NTB Tahun 2024 dan diiharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 .

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan fungsi RENJA Sekeretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya
2. Setiap Biro melaksanakan RENJA Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan
3. Mengoptimalkan Efektivitas pelaksanaannya akan dilaksanaka evaluasi kinerja secara berkala terhadap RENJA Tahun 2024 yang dkoordinir oleh Biro Administrasi Pimpinan

Rencana Tinda Lanjut

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA Tahun 2024.